



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SALATIGA**

Jalan Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp.(0298) 325159
Faks.(0298)325159 Situs <http://bakesbangpol.salatiga.go.id>
Surat elektronik : bakesbangpol@salatiga.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 dapat di selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama tahun 2024, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran Badan Kesbangpol Kota Salatiga, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Salatiga dengan kurun waktu 1 sampai dengan 3 tahun.

Adapun **Tujuan** Badan Kesbangpol Kota Salatiga harus mengacu pada Kota Salatiga Tahun 2023-2026 adalah: **“Menciptakan Tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan”**, dan sasarannya adalah : **“Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dan terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaasn baik sosial, budaya maupun pandangan politik”**

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Salatiga yang salah satunya menjadi tugas pokok

dan fungsi Badan Kesbangpol tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, stakeholder, swasta dan aparat pemerintah daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Salatiga maupun Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Salatiga sehingga berhasil dengan baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga ini disusun agar dapat memberikan penjelasan tentang capaian kinerja SKPD.

Salatiga, 17 Februari 2025

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA SALATIGA



Drs.V.T HARIBOWO,MM
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19650410 198502 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi....	5
2. Struktur Organisasi	10
3. Sarpra Pendukung PD.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Indikator Kinerja Utama	12
B. Rencana Stretegis	12
B.1. Visi dan Misi	12
B.2. Tujuan dan Sasaran	13
B.3. Kebijakan Program dan Kegiatan	14
B.4. Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Tingkat Capaian tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat TUJUAN dan SASARAN yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan TUJUAN sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga kemudian diubah lagi dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.

Sesuai dengan dokumen Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Salatiga maka indikator sasaran adalah Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba dan terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik”

Sebagai bentuk pencapaian tujuan yang ingin dicapai adalah dengan langkah yang spesifik dan terukur sehingga ditentukan Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat yang toleran, demokratis, terbuka, partisipasi aktif, kreatif dan mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan dan berkembangnya kemandirian dan dinamika Partai Politik, Organisasi sosial kemasyarakatan / LSM dan Lembaga pemerintah;
3. Meningkatkan dan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, Ketahanan Bangsa, Bela Negara, sosial kemasyarakatan budaya dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan cinta tanah air Indonesia;
4. Terwujudnya kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan kondusif.

Selain memiliki tujuan, penentuan sasaran agar menjadi *colaborate balancing* (kolaborasi penyeimbang), maka ditentukanlah beberapa sasaran antara lain :

1. Terwujudnya kapasitas kelembagaan organisasi yang memiliki kewenangan, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan organisasi modern dan mampu beradaptasi terhadap perubahan dalam rangka peningkatan kinerja dan derajat pelayanan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, pembinaan politik dalam negeri;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
3. Terwujudnya kualitas SDM yang memiliki kapabilitas dan profesional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Terwujudnya sistem dan mekanisme efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
6. Terselenggaranya intensitas kualitas koordinasi antar dan intern organisasi dalam upaya menjaring berbagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan strategis untuk memelihara stabilitas daerah yang aman, nyaman, tentram dan kondusif;
7. Terlaksananya kualitas fasilitasi pelayanan kepada Parpol, Ormas, LSM, Toga, Tomas, masyarakat dan berbagai elemen organisasi terkait lainnya termasuk pelayanan rekomendasi penelitian;
8. Terwujudnya kanalisasi dan akses aspirasi politik masyarakat yang santun, berbudaya Pancasila dan beradab berdasarkan moralitas dan politik;
9. Terwujudnya persatuan, kesatuan, toleransi dan rasa saling menghormati antar berbagai golongan dan elemen masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka NKRI.

Tentunya dalam usahanya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut cukup banyak kendala/ hambatan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kota Salatiga di Tahun 2024 ini :

1. Kegiatan yang dilaksanakan secara lintas sektoral khususnya dengan Instansi Vertikal terhambat dengan sulitnya koordinasi dengan instansi yang bersangkutan dan jadwal yang saling bertumbukan;
2. Iklim perubahan regulasi yang intensitasnya cukup tinggi, sehingga menyulitkan implementasi suatu program kegiatan
3. Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai sehingga pelaksanaan pekerjaan kurang maksimal
4. Adanya Rasionalisasi Anggaran yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Bertitik tolak dari RPD Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPD Kota Salatiga sebagaimana yang tertuang dalam Renstra dan terimplementasi dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kota Salatiga, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LKjIP ini akan menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Kepala Badan Kesbangpol selaku pimpinan SKPD kepada Wali Kota Salatiga ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024 yaitu tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Badan Kesbangpol Kota Salatiga Tahun 2023–2026. Wilayah Kota Salatiga merupakan kota kecil yang mempunyai potensi yang luar biasa mengingat letak geografisnya dan kondisi demografinya yang menyebabkan Kota Salatiga mempunyai peran yang cukup penting sebagai indikator kondusifitas wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

Kota Salatiga terletak ditengah Kabupaten Semarang. Karena letaknya yang strategis diantara Kota Semarang dan Solo, menjadikan kota ini sebagai kota transit perdagangan maupun pariwisata. Didukung oleh kondisi iklimnya yang sejuk yaitu terletak di kaki gunung Merbabu menjadikan kota ini cocok untuk tempat pendidikan. Sebagai kota yang terletak pada lintasan

perdagangan JOGLOSEMAR (Jogya, Solo dan Semarang), Kota Salatiga menjadi kota yang demikian pesat kemajuannya dalam perdagangan. Arah kebijakan umum pembangunan Kota Salatiga tahun 2023-2026 salah satunya adalah "Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan"

Kebijakan diarahkan pada upaya-upaya peningkatan supremasi hukum daerah dan perlindungan HAM dengan menitikberatkan pada penyempurnaan produk-produk hukum daerah, peningkatan kualitas aparat hukum daerah serta penguatan peraturan daerah dengan menitikberatkan pada penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kemampuan masyarakat serta peningkatan swadaya masyarakat untuk mengantisipasi perubahan sosial, politik serta meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan kondisi politik di wilayah. Salah satu tugas yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai instrumen desentralisasi dan dekonsentrasi adalah penyelenggaraan fungsi kesatuan bangsa dan politik di daerah salah satunya adalah penyelenggaraan Fasilitasi Organisasi masyarakat, hibah organisasi masyarakat serta pengawasan/monitoring evaluasi ormas.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut: Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan.

mewujudkan sasaran yang ingin dicapai untuk masyarakat Kota Salatiga antara lain:

- a. Menurunnya Jumlah kasus Penyalahgunaan Narkoba
- b. Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik

Dalam rangka menindaklanjuti arah kebijakan Pemerintah Kota Salatiga, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berusaha mengidentifikasi beberapa hal - hal penting sebagai permasalahan pokok dalam urusan kesatuan bangsa, politik dalam negeri skala regional (perspektif wilayah Kota Salatiga) adalah sebagai berikut :

1. Penduduk Kota Salatiga dengan kemajemukan suku, etnis, agama dan budaya.
2. Makin bertambahnya penduduk yang datang maupun pendatang sehingga akan berdampak pada rumitnya pemantauan terhadap potensi konflik yang mana akan mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban.
3. Apatisme terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional pada sebagian masyarakat khususnya generasi muda.
4. Agenda lima tahunan (pilkada) yang berimplikasi pada meningkatnya suhu politik yang pada gilirannya menyebabkan kerawanan sosial.
5. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan peredaran miras.
6. Tidak stabilnya harga kebutuhan pokok dan BBM, sehingga akan menyebabkan pada makin menurunnya tingkat rasa aman di masyarakat akibat kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan naiknya angka kriminalitas.
7. Memperkokoh/memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan semangat kebangsaan dalam menghadapi berbagai tuntutan yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Susunan Organisasi

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

1. Susunan Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Untuk menyelenggarakan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah.
- b) Menyelenggarakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c) Menyelenggarakan Koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- d) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan penyelenggaraan politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - e) Menyelenggarakan Fasilitasi forum Koordinasi pimpinan Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan antar instansi pemerintah.
2. Sekretariat.
- Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta pelayanan administratif Badan di lingkup perencanaan, keuangan umum dan kepegawaian.
3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
- Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkup ideologi dan Wawasan kebangsaan serta bela negara dan karakter bangsa.
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkup kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen serta penanganan konflik.

5. Bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan

Bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan.

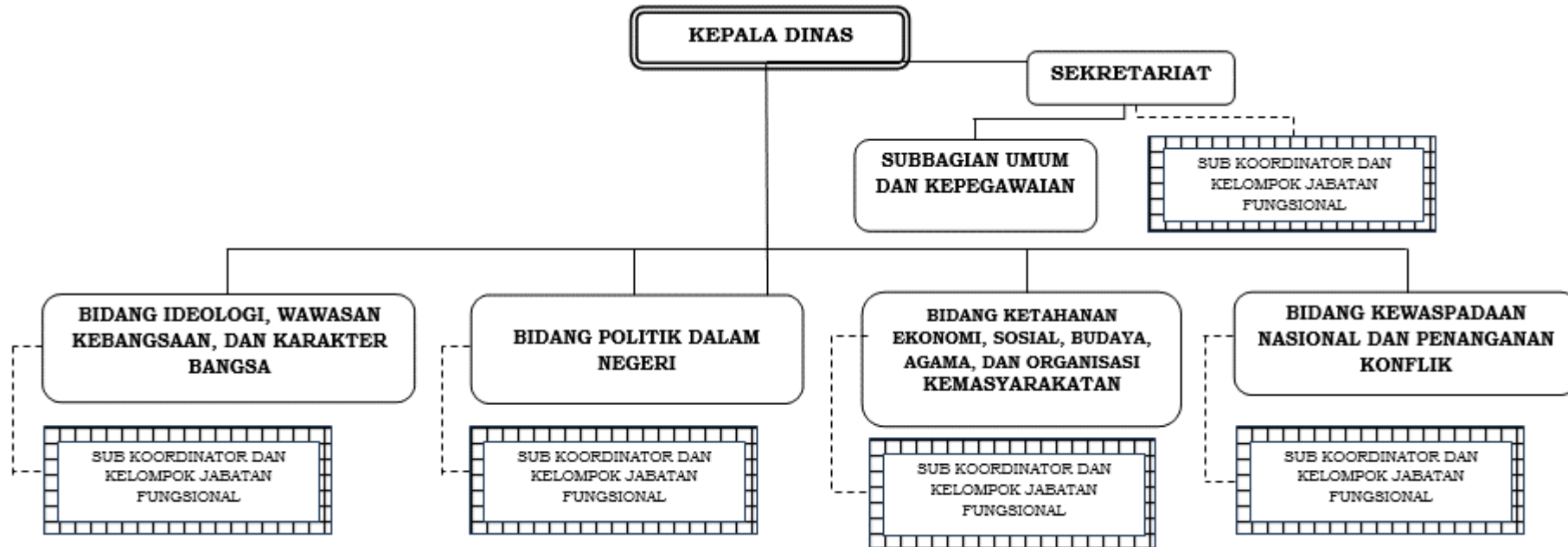
6. Bidang Politik dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkup pendidikan politik dan peningkatan demokrasi serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

a. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No.11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dan dalam pengaturan lebih rinci Tugas Pokok dan Fungsi juga berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 129 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



Sumber : Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 tahun 2024

1. Sarana dan Prasarana Pendukung Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang. Data rincian kepegawaian terdiri dari sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1
DATA PEGAWAI PADA BADAN KESBANGPOL
BERDASARKAN PANGKAT DAN JENJANG PENDIDIKAN

No	Kualifikasi	PNS	Non PNS	Jumlah (orang)
1.	Pendidikan			
	a. SD	-	-	-
	b. SMP	-	-	-
	c. SMA	2	5	7
	d. DIII	2	1	3
	e. S1/DV	19	-	19
	f. S2	4	-	4
	g. S3	-	-	-
	jumlah	27	6	33
2.	Pangkat/Golongan			
	a. Golongan I	-	-	-
	b. Golongan II	1	1	-
	c. Golongan III	22	-	-
	d. Golongan IV	4	-	-
	e. Non PNS	-	5	-
	jumlah	27	6	33

Sumber : Data Kepegawaian Kesbangpol Per 31 Desember 2024

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan sarana operasional merupakan sarana yang sangat vital dalam memperlancar dan menunjang keberhasilan dan pencapaian dalam pelaksanaan tugas yang optimal. Dengan memanfaatkan secara optimal perlengkapan operasional yang diberikan, diharapkan mampu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan fungsi fasilitator, mediasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun inventaris operasional yang dimiliki dan ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sarana pendukung kegiatan dapat dilihat dalam **Tabel 1.2.** sebagai berikut :

Tabel 1.2
DATA SARANA DAN PRASARANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Gedung	1 unit
2.	Alat Besar	2 unit
3	Alat Angkutan	26 unit
4.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	263 unit
5.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	16 unit
6.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4 unit
7.	Alat Keselamatan Kerja	6 unit
8.	Komputer & Peralatan	65 Unit

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Kesbangpol Kota Salatiga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesbangpol juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, baik di level Bidang maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

B. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Badan Kesbangpol Kota Salatiga Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun yang berisi tentang Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

B.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah upaya langkah yang spesifik dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun beberapa Tujuan dari Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti dibawah ini :

1. Meningkatkan ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat;
2. Meningkatkan Koordinasi tentang ketahanan ekonomi;
3. Meningkatkan Koordinasi Intelejen yang sinergis;
4. Meningkatkan Kerukunan antara pemeluk agama, penganut kepercayaan, suku dan etnis;
5. Meningkatkan rasa nasionalisme persatuan dan kesatuan bangsa;
6. Mewujudkan rasa paham dan semangat kebangsaan bagi komponen bangsa;
7. Mewujudkan berkurangnya tingkat kenakalan remaja dan pengguna narkoba;
8. Mewujudkan peningkatan Peran Panwas dalam Pemilu;

2. Sasaran

Dari Tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Masyarakat Kota Salatiga yang aman dan tertib;
2. Meningkatnya Koordinasi tentang ketahanan ekonomi;
3. Meningkatnya Koordinasi Intelejen, Camat, Lurah, Kasi Trantib dan FKDM;
4. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama secara harmonis saling menghormati;
5. Terbangunnya Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat dalam mewujudkan kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila;
6. Meningkatnya Fasilitas Pencapaian Halaqoh dalam upaya peningkatan wawasan Kebangsaan;
7. Berkurangnya Penyalahgunaan narkoba
8. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu;

B.3. KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Salatiga yang sejalan dengan Misi ke-tiga yaitu : Mewujudkan ketertiban dan keamanan dengan mengutamakan asas kepastian hukum, keterbukaan, bertanggungjawab, responsif dan partisipatif. Sehingga Sasaran, Kebijakan dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan fasilitasi organisasi masyarakat, hibah organisasi masyarakat serta pengawasan/monitoring evaluasi Ormas

b. Penyelenggaraan koordinasi Tim FKDM, kewaspadaan Dini, Monev dan Pengawasan Orang/Lembaga Asing

Maksud kebijakan **kedua** adalah melaksanakan pengawasan serta monitoring ormas yang berada di Salatiga, memberikan fasilitasi Ormas serta hibah Ormas, mengajak ormas untuk berperan serta dalam pembangunan Kota Salatiga.

Maksud kebijakan **kedua** memelihara kewaspadaan atas setiap gejala-gejala yang mengarah kepada tindakan pemecah belah komponen bangsa (dis-integrasi bangsa) baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri serta mengupayakan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengantisipasi potensi yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Dari sasaran kebijakan tersebut selanjutnya diwujudkan ke dalam arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kebijakan di Bidang Administrasi Umum Pemerintahan yaitu sub bidang Politik, Hukum, Keamanan dan ketertiban Masyarakat, yang dijabarkan ke dalam Program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun program-program mengalami perubahan nomenklatur yaitu dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada Badan Kesbangpol seperti dibawah ini:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota

(1) Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

(3) Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

(4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

(5) Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jas komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

(1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

c) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta budaya politik

(1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dari partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi Politik

- Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dari partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi Politik

- Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi Politik
- Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dari partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi Politik.

2) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

(1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan orang asing di Daerah

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

(1) Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, dan Budaya.

- Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,

dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan Umat Bergama dan penghayat Kepercayaan di daerah

- Pelaksanaan Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan Umat Beragama dan penghayat Kepercayaan di daerah

4) Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

(1) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah
- Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah
- Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah

- Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah
- Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

B.4. RENCANA KINERJA SASARAN DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN TAHUN 2024

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses penetapan kegiatan tahunan dari indikator kinerja berdasarkan program kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan dituangkan kedepan Rencana Kerja SKPD, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masyarakat Kota Salatiga dalam satu tahun berjalan.

Pada tahun 2024, dalam Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan sasaran, indikator dan rencana tingkat capaian target. Sebagaimana tampak pada Tabel 2.1 berikut ini, akan memberikan gambaran dan deskripsi yang jelas bagaimana indikator yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun berjalan akan terlihat/terbaca pada rencana tingkat capaian

(target). Korelasi ini akan dikomparasi dan di lihat realisasinya setelah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.1
Rencana Kerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Menciptakan Tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	Meningkatkan penyelenggaraan fasilitasi Organisasi Masyarakat, hibah organisasi	Penyelenggaraan fasilitasi organisasi Masyarakat, hibah organisasi masyarakat serta	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota
		Meningkatnya kerjasama dengan partai politik untuk melakukan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa	pengawasan/ monitoring evaluasi ormas	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga Pendidikan melalui pendidikan dan pengembangan etika serta budaya politik
	Menurunnya Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi, khususnya lembaga pendidikan, untuk melakukan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan
		Mengintensifkan penggunaan sosial media untuk mengkampanyekan gerakan anti narkoba		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya
	Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	Meningkatkan fungsi TIM FKDM, Tim Kewaspadaan Dini, Monev dan pengawasan Orang/lembaga Asing	Penyelenggaraan koordinasi Tim FKDM, kewaspadaan Dini, Monev dan pengawasan Orang/lembaga Asing	Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi dan penanganan konflik sosial

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Tahun					Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1	Penanggulangan Potensi Konflik	%	NA	100	100	100	100	100	100
2	Prevalensi Penyalahguna Narkoba	%	1.73	1,72	1,71	1,70	1,69	1,69	1,69
3	Terselesaikannya kasus konflik shorisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya, maupun politik	%	NA	100	100	100	100	100	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari SKPD, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Badan Kesbangpol Kota Salatiga selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Badan Kesbangpol Kota Salatiga tahun 2024.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata angka dan jumlah. Prosentase Pencapaian rencana tingkat capaian dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Prosentase Capaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Tabel Kategori Pencapaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100%	Sangat Baik
II	75 % s.d 100 %	Baik
III	55 % s.d 74 %	Cukup
IV	< 55 %	Kurang

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan

kegagalan dan pencapaian sasaran Strategi Badan Kesbangpol Kota Salatiga dan sebab- sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Indikator-indikator pencapaian sasaran, target, realisasi dan prosentase tingkat capaian sasaran sebagaimana tampak pada **Tabel 3.2** sebagai berikut.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Real Anggaran	% Real Fisik
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.782.667.863,00	6.213.836.986,00	91,61	100,00%
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	842.513.000,00	774.012.900,00	91,87	100,00%
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	12.689.909.536,00	12.606.494.536,00	99,34	100,00%
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.731.008.000,00	1.639.225.300,00	94,70	100,00%
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	167.632.000,00	148.291.750,00	88,46	100,00%
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	713.690.300,00	668.059.900	93,61	100,00%
JUMLAH				96,17%	100 %

Dari tabel 3.3 diatas dapat di lihat bahwa target capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik rata-rata telah mencapai target 96,17% sehingga masuk dalam kategori capaian sasaran “Baik” dengan nilai rentang capaiannya 75% s.d 100%.

Hasil pengukuran kinerja dari 2 Sasaran Utama dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dapat di lihat pada **Tabel 3.3** sebagai berikut :

Tabel 3.3
Hasil pengukuran Indikator Kinerja Daerah (IKD)
dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Target	Realisasi
1.	Penanggulangan Potensi Konflik	100 %	100 %
2.	Prevalensi Penyalahgunaan narkoba	1,71 % per 10.000 penduduk	1,65 % per 10.000 penduduk
3.	Terselesaikannya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya, maupun politik	100 %	100%

Dari tabel 3.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Badan Kesbangpol Kota Salatiga diatas dapat di lihat bahwa :

(1) Indikator Kinerja Daerah yaitu Penanggulangan Potensi Konflik Analisis capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Daerah	Target	Realisasi
1.	Penanggulangan Potensi Konflik	100 %	100 %

Angka Tersebut di dapat dari Formula :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Potensi Konflik}}{\sum \text{Jumlah potensi konflik terselesaikan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{8}{8} \times 100$$

$$= 100\%$$

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini:
Target capaian kinerja Tahun ini ditargetkan 100 % terealisasi 100% , yang artinya konflik di wilayah salatiga dapat terselesaikan sehingga kondisi Kota Salatiga kondusif.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Realisasi capaian kinerja tahun ini adalah 100% sedangkan untuk capaian kinerja tahun 2023 juga 100%, sehingga tidak dapat membandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target Kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi Realisasi Kinerja pada Tahun ini sudah mencapai Target yang tertuang pada RPD, dengan prosentase tingkat capaian 100 %.
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.
4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
 - a. Koordinasi yang intens antara pemerintah Kota Salatiga dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam wadah kegiatan cipta kondusifitas Kota Salatiga serta pemberdayaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) serta Tim Penanganan Konflik Sosial
 - b. Meningkatnya pembinaan kepada masyarakat tentang kewaspadaan Nasional
 - c. Diselenggarakannya rasa patriotisme dengan peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat serta pendidikan karakter.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Untuk Indikator Penanggulangan Potensi Konflik sudah efisien dikarenakan Target dapat tercapai 100%, adapun Program Yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan anggaran

Rp. 713.690.300,00 dan terealisasi sebesar 88,95 % atau Rp.668.059.900,00

7. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja dan keluaran sub kegiatan antara lain:
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelmbagan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang keluarannya antara lain Koordinasi Tim, Cipta Kondusifitas, Pengamanan.
 - b. Penyusunan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelmbagan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang keluarannya antara lain Koordinasi Tim, Cipta Kondusifitas, Pengamanan. Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Patroli Pemantauan Wilayah (KIRKA) dengan Keluaran antara lain Monitoring dan evaluasi Orang Asing dan Lembaga asing
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Pengamanan Antisipasi Kerawanan Sosial dengan keluaran Seminar Orientasi Kewaspadaan Nasional
 - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan keluaran Kewaspadaan dini di Daerah.

- e. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan keluaran pemantauan dan Monev Orang Asing.
- f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Indikator Kinerja Utama yaitu “Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba”

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Prevalensi Penyalahgunaan narkoba	1.71	1.65

Angka Tersebut di dapat dari Formula :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Pengguna Narkoba}}{\sum \text{Penduduk Salatiga}} \times 10.000 \\
 &= \frac{33}{198.971} \times 10.000 \\
 &= 1,65
 \end{aligned}$$

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini.
Target capaian kinerja Tahun ini ditargetkan 1,72 kejadian per 10.000 penduduk dan realisasi 1,65 per 10.000 penduduk.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu. capaian kinerja tahun 2024 adalah 33 kasus atau 1.66 kejadian per 10.000 penduduk, sehingga dibandingkan dengan tahun sebelumnya prevalensi penyalahguna narkoba di Kota Salatiga mengalami kenaikan sebanyak 10 Pengguna Narkotika.
3. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi adalah Realisasi Kinerja pada Tahun

ini sudah mencapai Target yang tertuang pada RPD, dengan prosentase tingkat capaian 103,51 %

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.
5. Analisis penyebab Keberhasilan dan Peningkatan kinerja sebagai berikut :
 - a. Masyarakat sudah banyak yang sadar akan bahaya narkoba
 - b. Adanya sosialisasi P4GN yang berkala
 - b. Banyaknya Edukasi tentang bahaya narkoba dari Media
 - c. Adanya Tes Narkoba bagi Masyarakat/ASN yang rutin dilaksanakan
6. Analisis dan efisiensi penggunaan Sumber daya, Program yang mendukung Indikator Kinerja Daerah tersebut adalah Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya dengan sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp 162.424.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.144.325.500,00 atau 88,46 %.
7. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah:
 - a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang di Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah

kegiatan Operasional BNK, Pengadaan Alat Tes Narkoba, Fasilitasi Tes Narkoba bagi ASN dan Masyarakat ASN/TNI/POLRI anggaran untuk tahun 2024.

(3) Indikator Kinerja Utama yang kedua yaitu “Terselesaikannya kasus Konflik Horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial,budaya maupun politik”

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Terselesaikannya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial,budaya,maupun politik	100 %	100%

Angka Tersebut di dapat dari Formula :

$$\frac{\text{Jumlah Konflik Horisontal}}{\text{Jumlah konflik terselesaikan}} \times 100$$

$$= \frac{6}{6} \times 100$$

$$= 100\%$$

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini, Target capaian kinerja Tahun ini ditargetkan 100 % dan telah terealisasi sebesar 100%
2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Pada tahun 2023 capaiannya adalah 100% begitu juga dengan tahun 2024.
3. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi adalah Realisasi Kinerja pada Tahun ini sudah mencapai Target yang tertuang pada RPD, dengan prosentase tingkat capaian 100 %
4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.
5. Analisis penyebab Keberhasilan dan Peningkatan kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya Koordinasi dengan TIM GNRM, PWK serta DESK untuk Pemilu secara rutin serta Koordinasi Tim Pengawasan Ormas
 - b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat melalui sosialisasi akan pentingnya menjaga kondusifitas, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, rasa persatuan dan kesatuan sehingga akan meminimalisir terjadinya potensi konflik horisontal
 - c. Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama serta menjalin hubungan yang harmonis dengan Organisasi Masyarakat guna pembangunan Bangsa.
6. Analisis dan efisiensi penggunaan Sumber daya, Program yang mendukung Indikator Kinerja Daerah tersebut adalah Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya Rp 167.632.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.148.291.750,00 atau 88,46 %, serta Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta budaya politik Rp 12.689.909.536,00 terealisasi sebesar Rp. 12.606.494.536,00 atau 99,34%
7. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah kegiatan DESK Pemilu, Tim GNRM, Tim Pengawasan Ormas yang terdapat dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya :
- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan Narkotika, fasilitasi kerukunan Umat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan keluaran Pemantuan dan Dampak Perekonomian
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan Narkotika, fasilitasi kerukunan Umat Beragama dan

penghayat kepercayaan di daerah dengan keluaran Pemnatuan dan Dampak Perekonomian dengan keluaran seminar Kerukunan Umat Beragama, Operasional BNK, P4GN.

Tabel 3.4

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Indikator Program	Target	realisasi
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor 84,75	Skor 85,49
2.	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila	65%	84,38%
3.	Prosentase Pendidikan Politik yang dilaksanakan	100%	100 %
4.	Prosentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	42,5%	62,16%
5.	Prosentase Penurunan penyalahgunaan narkoba	6 %	0 %
6.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai 52	Nilai 87,43
7.	Prosentase Penurunan kejadian atau konflik sosial	25 %	0 %

Dari tabel 3.4 Indikator Kinerja Program Badan Kesbangpol Kota Salatiga diatas dapat di lihat bahwa :

- (1) Indikator Kinerja Program yang pertama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan nilai atau skor 85,49 atau masih dalam rentang nilai “baik”

Analisis capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator program	Target	Realisasi
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,75	85,49

Angka Tersebut di dapat dari Formula :

$$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{nilai Penimbang}$$

Jumlah Responden	92								
Nilai/Unsur	311	310	295	346	322	307	317	351	301
NRR/Unsur	3,38	3,37	3,21	3,76	3,50	3,34	3,45	3,82	3,27
NRR tertimbang/Unsur	0,372	0,371	0,353	0,414	0,385	0,367	0,379	0,420	0,360
IKM Unit Pelayanan									
	85,49								

1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini.
Target capaian kinerja Tahun ini ditargetkan Skor 84.75
2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Capaian kinerja tahun 2023 semester II adalah 85.09 sehingga dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya senilai 0.43
3. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi adalah Realisasi Kinerja pada Tahun ini sudah mencapai Target yang tertuang pada RPD, dengan prosentase tingkat capaian 100 %
4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.
5. Analisis Keberhasilan dan Peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pelayanan yang prima
 - b. ASN adalah abdi masyarakat yang harus mengedapanka pelayanan yang prima kepada masyarakat
6. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya, program yang mendukung Indikator Kinerja Daerah

tersebut adalah Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

7. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah dan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, adapun Anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota adalah Rp 6.782.667.863,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.213.836.986,00 atau 91,61 %.

(2) Indikator Kinerja Program yang kedua yaitu “Prosentase pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan” terdapat kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan di Kota Salatiga telah mencapai 84,38%, Analisis capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

No	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Presentase Pemahaman Masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan	60 %	84,38 %

Dengan perhitungan:

$$y = \frac{\frac{p}{t}(x) + \frac{p}{t}(x) + \frac{p}{t}(x) + \frac{p}{t}(x) + \frac{p}{t}(x) + \frac{p}{t}(x)}{(\text{kegiatan})} \times 100\%$$

$$y = \frac{\frac{65}{80} + \frac{70}{80}}{2(\text{kegiatan})} \times 100\% = 84,38\%$$

1. Perbandingan Target pada Tahun ini adalah 65 % sedangkan realisasi adalah 84,38%
2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini Realisasi tahun sebelumnya adalah 83,33 % dan mengalami kenaikan ditahun ini menjadi 84,38%
3. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

rencana strategis organisasi adalah Realisasi Kinerja pada Tahun ini sudah mencapai Target yang tertuang pada RPD dengan prosentase 100%

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.
5. Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja
 - a. Masyarakat sudah semakin paham pentingnya menjaga rasa cinta tanah air seiring dengan perkembangan waktu
 - b. Penanaman Karakter dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan sudah menjadi hal yang wajib dilaksanakan di Daerah Kabupaten/Kota
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dengan anggaran Rp.842.513.000,00 dan terserap Rp.774.012.900,00
7. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja di atas adalah :
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan Rp 82.470.000,00 yang telah terealisasi sebesar Rp. 48.042.500,00
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan Rp 760.043.000,00 yang telah terealisasi sebesar Rp. 725.970.400,00

(3) Indikator Kinerja Program yang Ketiga yaitu “Prosentase Pendidikan Politik yang dilaksanakan”

No	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Prosentase Pendidikan Politik yang dilaksanakan	100 %	100%

Dengan perhitungan:

$$y = \frac{\text{Jumlah Pendidikan Politik yang terlaksana}}{\text{Jumlah Pendidikan Politik yang akan dilaksanakan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{1 (\text{Kegiatan})}{2 (\text{kegiatan})} \times 100\% = 50\%$$

1. Perbandingan Target pada Tahun ini adalah 100 % sedangkan realisasi adalah 50 %
2. Pada Tahun 2024 capaian sebesar 100%
3. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi. Realisasi Prosentase Pendidikan Politik yang dilaksanakan tahun 2024 mencapai 50%.
4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.
5. Analisis penyebab ketidak berhasilan peningkatan kinerja
 - a. Adanya rasionalisasi pada Anggaran sehingga kegiatan pendidikan politik tidak dapat dilaksanakan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator adalah :
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran Rp.12.689.909.536,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.606.494.536,00
 - Sub Kegiatan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran Rp.372.969.700,00 terealisasi sebesar Rp. 309.233.200,00

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran Rp. 19.034.100,00 terealisasi sebesar Rp. 11.846.600,00

(4) Indikator Kinerja Program yang ke Empat adalah “Presentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan “ dengan Capaian 62,16% .

No	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Presentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	42,5 %	62,16 %

Dengan perhitungan:

$$y = \frac{\text{Jumlah Ormas yang aktif}}{\text{Jumlah Ormas yang terdaftar}} \times 100\%$$

$$y = \frac{115}{185} \times 100\% = 62.16\%$$

Jumlah 115 didapat dari Ormas yang aktif yaitu ormas yang mendapat hibah sebanyak 12 Ormas dengan SK Wali Kota Nomor 200.1/45/2024 tentang Penerima Hibah pada Bdan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, ormas yang mendapat Fasilitasi berupa Jamuan Makan dan minum rapat sebanyak 20 Ormas, serta ormas yang tidak termasuk di kedua hal tersebut dan diundang dalam kegiatan Sosialisasi atau Audiensi

dari unsur Ormas sebanyak 83 ormas. Sehingga total ormas yang aktif adalah 115 ormas yang dibandingkan dengan jumlah ormas di Kota Salatiga tahun 2024 sebanyak 185 ormas.

1. Perbandingan kinerja pada Tahun 2024 Pada tahun 2024 sebanyak 57,37 % sedangkan capaian untuk tahun 2024 ini adalah 62,16%
2. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi yaitu 62.16%
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.
4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja
 - Terjaganya harmonisasi antara pemerintah Kota dengan Organisasi Masyarakat yang ada di Kota Salatiga melalui Audiensi ormas dengan Wali Kota dan Pembinaan ormas
 - Terfasilitasinya Kegiatan Organisasi Masyarakat oleh Badan Kesbangpol
 - Dibentuknya Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Kota Salatiga
 - Monitoring dan evaluasi Ormas
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Program Pemeberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 1.731.008.000,00 dan terserap Rp. 1.639.225.300,00
6. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah :
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran` Ormas, Pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah berupa Audiensi Ormas dengan Walikota, Fasilitasi Ormas, Hibah Ormas, Monev Hibah, Sosialisasi Hibah sebesar 1.702.153.000,00 terealisasi 1.617.362.600,00

- Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah berupa Pengawasan Ormas dan Pengelolaan hibah sebesar 28.855.000,00 terealisasi 21.862.700,00
- (5) Indikator Kinerja Program yang kelima adalah “Prosentase penurunan Penyalahgunaan Narkoba “ dengan Capaian 0 % dan Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan capaian 87,43

No	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Presentase Penurunan penyalahgunaan narkoba	6 %	0 %
2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai 52	Nilai 87,43

Dengan perhitungan:

$$y = \frac{\text{Jumlah Penyalahguna Th lalu} - \text{Jumlah Penyalahguna Th.skrg}}{\text{Jumlah Penyalahguna Tahun lalu}} \times 100\%$$

$$y = \frac{23-33}{23} \times 100\% = -0,43 \%$$

1. Perbandingan kinerja pada Tahun 2023 capaian pada tahun 2023 adalah 0% sedangkan di tahun 2024 mengalami penambahan sebanyak 5 kasus sehingga capaian mengalami kenaikan kasus senilai 0,43 %
2. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi yaitu 0 % atau jumlah pengguna di Tahun 2023 yaitu 23 pengguna dan untuk tahun 2024 mengalami kenaikan 10 kasus sehingga menjadi 33 kasus, Sedangkan untuk Indeks Kerukunan Umat Beragama data didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada Tokoh agama/Tokoh Masyarakat lintas agama berjumlah 69 orang dan didapat hasil IKUB sebesar: 87,43 skor

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.
4. Analisis ketidakberhasilan dalam peningkatan kinerja
 - Belum optimalnya Kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba
 - Belum optimalnya pelaksanaan rencana aksi dan Tim BNK Kota Salatiga
 - Adanya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama yang berkala serta terbinanya hubungan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Salatiga.
 - Semangat mempertahankan kota tertoleran di Indonesia
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya dengan anggaran Rp. 167.632.000,00 dan terserap Rp.148.291.750,00
6. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Bahan perumusan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi sebesar 5.207.900,00 terealisasi 3.966.250,00
 - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi sebesar terealisasi 144.325.500 dari anggaran sebesar 162.424.100,00
- (6) Indikator Kinerja Program yang keenam adalah “Prosentase Penurunan Kejadian/potensi konflik sosial “

No	Indikator Program	Target	Realisasi
1	Presentase Penurunan Kejadian/Potensi Konflik Sosial	25 %	0 %

Dengan perhitungan:

$$y = \frac{\text{Jumlah potensi konflik Th lalu} - \text{Jumlah Potensi konflik Th.skrg}}{\text{Jumlah potensi konflik Tahun lalu}} \times 100\%$$

$$y = \frac{7-8}{7} \times 100\% = 0 \%$$

1. Perbandingan kinerja pada Tahun 2023 adalah 7 kejadian/potensi konflik, sedangkan Tahun sekarang terdapat 8 kejadian/potensi konflik yang artinya ada kenaikan jumlah konflik
2. Perbandingan kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis organisasi yaitu 0% yang artinya mengalami kenaikan 1 kasus, akan tetapi OPD dinilai berhasil karena angka kejadian /potensi konflik masih dibawah target yang tertuang dalam RPD yaitu 10 kejadian/potensi konflik sedangkan realiasi kejadian factual di Tahun 2024 terdapat 8 Kejadian/konflik sosial sehingga capain keberhasilan adalah 100 %
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.
4. Analisis penyebab Keberhasilan
 - Adanya Koordinasi rutin pada Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Cipta Kondusifitas dan FKDM serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
 - Sinergitas dan Komunikasi antara Pemerintah Kota utama nya Badan Kesbangpol dengan unsur TNI/POLRI/FKDM sehingga mampu menciptakan kondusifitas wilayah
 - Penekanan terhadap anti radikalisme melalui sosialisasi maupun media sosial.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Program Peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan anggaran Rp. 713.690.300,00 dan terserap Rp. 668.059.900,00
6. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah :

- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah sebesar 335.134.300,00 terealisasi 301.882.300,00
- Sub Kegiatan Penyusunan bahan perumusan di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah sebesar 33.675.000,00 terealisasi 30.900.000,00
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah sebesar 38.512.200,00 terealisasi 35.862.200,00
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah sebesar 152.284.500,00 terealisasi 147.990.000,00
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah sebesar 28.110.000,00 terealisasi 26.806.000,00

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 125.974.300,00 dan terealisasi Rp.124.619.400,00

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran Badan Kesbangpol Kota Salatiga dapat di lihat pada **tabel 3.5** sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA SALATIGA REKAPITULASI REALISASI URUSAN, BIDANG, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BADAN KESBANGPOL Periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024				
Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
8	Unsur Pemerintahan Umum	22.927.420.699,00	22.049.921.372,00	96,17
8,01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	22.927.420.699,00	22.049.921.372,00	96,17
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.782.667.863,00	6.213.836.986,00	91,61
	DAERAH KABUPATEN/KOTA			
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.359.000,00	7.710.400,00	82,38
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.359.000,00	7.710.400,00	82,38
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.752.140.077,00	4.310.788.691,00	90,71
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.728.940.077,00	4.287.604.691,00	90,67
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.200.000,00	23.184.000,00	99,93
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.328.000,00	29.580.000,00	97,53
8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30.328.000,00	29.580.000,00	97,53
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	846.789.460,00	803.053.748,00	94,84
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.009.500,00	14.817.500,00	98,72
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.938.760,00	20.443.900,00	93,19
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.755.900,00	74.273.500,00	94,31
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.126.000,00	16.200.200,00	80,49
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.110.000,00	940.000,00	84,68
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	709.849.300,00	676.378.648,00	95,28
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	360.147.400,00	345.962.500,00	96,06
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	360.147.400,00	345.962.500,00	96,06
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.047.226,00	170.346.542,00	90,11
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.080.000,00	1.000.000,00	92,59
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.000.000,00	24.164.289,00	58,94
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.967.226,00	145.182.253,00	98,79
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.856.700,00	546.395.105,00	91,85
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.858.700,00	125.600.705,00	79,06
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.000.000,00	0,00	0,00
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.390.000,00	28.540.000,00	97,11
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	397.608.000,00	392.254.400,00	98,65

Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	842.513.000,00	774.012.900,00	91,87
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	842.513.000,00	774.012.900,00	91,87
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	82.470.000,00	48.042.500,00	58,25
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	760.043.000,00	725.970.400,00	95,52
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	12.689.909.536,00	12.606.494.536,00	99,34
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilhan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	12.689.909.536,00	12.606.494.536,00	99,34
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilhan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	12.297.905.736,00	12.285.774.736,00	99,90
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilhan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	372.969.700,00	309.233.200,00	82,91
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilhan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	19.034.100,00	11.486.600,00	60,35
8.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.731.008.000,00	1.639.225.300,00	94,70
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.731.008.000,00	1.639.225.300,00	94,70
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.702.153.000,00	1.617.362.600,00	95,02
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	28.855.000,00	21.862.700,00	75,77
8.01.05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	167.632.000,00	148.291.750,00	88,46
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	167.632.000,00	148.291.750,00	88,46
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	162.424.100,00	144.325.500,00	88,86
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.207.900,00	3.966.250,00	76,16
8.01.06	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	713.690.300,00	668.059.900,00	93,61
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	713.690.300,00	668.059.900,00	93,61
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	335.134.300,00	301.882.300,00	90,08
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	33.675.000,00	30.900.000,00	91,76
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	38.512.200,00	35.862.200,00	93,12
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	152.284.500,00	147.990.000,00	97,18
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	28.110.000,00	26.806.000,00	95,36
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	125.974.300,00	124.619.400,00	98,92

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan **Good Governance**. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada Pelaporan LKJIP Tahun 2024 ini ada beberapa indikator yang jauh dari target, seperti meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba sehingga diperlukan rencana aksi yang lebih optimal di tahun yang akan datang guna pengendalian kenaikan kasus di masyarakat.

Terselesaikannya potensi Konflik di Kota Salatiga tentu saja di pengaruhi oleh peran aktif Pemerintah Kota Salah satunya adalah terjaganya kondusifitas wilayah di Kota Salatiga yang merupakan peran aktif dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 telah tersusun, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun Anggaran 2024, dan bisa menjadi pedoman di tahun selanjutnya.

Salatiga, 17 Februari 2025
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA SALATIGA



Drs. V T HARIBOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19650410 198702 1 003